

## BAB II

### LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984).

Tujuan dari teori agensi adalah *pertama*, untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (*The belief revision role*). *Kedua*, untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (*The performance evaluation role*). Secara garis besar teori agensi dikelompokkan menjadi dua (Eisenhardt, 1989), yaitu *positive agency research* dan *principal agent research*. *Positive agent research* memfokuskan pada identifikasi situasi dimana agen dan prinsipal mempunyai tujuan yang bertentangan dan mekanisme pengendalian yang terbatas hanya menjaga perilaku *self serving* agen.

Secara eksklusif, kelompok ini hanya memperhatikan konflik tujuan antara pemilik (*stockholder*) dengan manajer. Sementara itu *principal agent research* memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya, secara garis besar penekanan pada hubungan *principal* dan *agent*. *Principal-agent research* mengungkapkan bahwa hubungan *agent-principal* dapat diaplikasikan secara lebih luas, misalnya untuk menggambarkan hubungan pekerja dan pemberi kerja, *lawyer* dengan kliennya, *auditor* dengan *auditee*. *Agency theory* tidak dapat dilepaskan dari kedua belah pihak diatas, baik prinsipal maupun agen merupakan pelaku utama dan keduanya mempunyai *bargaining position* masing-masing dalam menempatkan posisi, peran dan kedudukannya.

Prinsipal sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan sedangkan agen sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Posisi, fungsi, situasi, tujuan, kepentingan dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang tersebut akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan (*conflict of interest*) dan pengaruh antara satu sama lain. Berkaitan dengan auditing, baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang yang memiliki rasionalitas ekonomi, dimana setiap tindakan yang dilakukan termotivasi oleh kepentingan pribadi atau akan memenuhi kepentingannya terlebih dahulu sebelum memenuhi kepentingan orang lain.

Teori keagenan mengatakan sulit untuk mempercayai bahwa manajemen (*agent*) akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham (*principal*),

sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham (Copeland dan Weston, 1992:20). *Shareholder* atau prinsipal mempekerjakan agen untuk melaksanakan tugas termasuk pengambilan keputusan ekonomik, dalam lingkungan yang tidak pasti seperti perusahaan dalam kondisi *financial distress*. Agen sebagai seorang manajer akan mengambil keputusan untuk melakukan berbagai strategi guna mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Disisi lain agen merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh prinsipal berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya.

Teori keagenan menyatakan bahwa dalam pengelolaan perusahaan selalu ada konflik kepentingan (Brigham dan Gapenski,1996), antara manajer dan pemilik perusahaan, manajer dan bawahannya, serta pemilik perusahaan dan kreditor. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pihak yang melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut diatas. Aktivitas pihak-pihak tersebut, dinilai lewat kinerja keuangannya yang tercermin dalam laporan keuangan. Lebih lanjut dalam *agency theory*, pemilik perusahaan membutuhkan auditor untuk memverifikasi informasi yang diberikan manajemen kepada pihak perusahaan.

Sebaliknya, manajemen memerlukan auditor untuk memberikan legitimasi atas kinerja yang mereka lakukan (dalam bentuk laporan keuangan), sehingga mereka layak mendapatkan insentif atas kinerja tersebut. Disisi lain, kreditor membutuhkan auditor untuk memastikan bahwa uang yang mereka kucurkan untuk membiayai kegiatan perusahaan, benar-benar digunakan sesuai dengan persetujuan yang ada,

sehingga kreditor bisa menerima bunga atas pinjaman yang diberikan. Pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh pihak independen memerlukan biaya atau *monitoring cost* dalam bentuk biaya audit, yang merupakan salah satu dari *agency cost* (Jensen dan Meckling, 1976). Biaya pengawasan (*monitoring cost*) merupakan biaya untuk mengawasi perilaku *agent* apakah *agent* telah bertindak sesuai kepentingan *principal* dengan melaporkan secara akurat semua aktivitas yang telah ditugaskan kepada manajer.

Uraian tersebut diatas memberi makna bahwa auditor merupakan pihak yang dianggap dapat menjembatani kepentingan pihak pemegang saham (*principal*) dengan pihak manajer (*agent*) dalam mengelola keuangan perusahaan (Setiawan, 2006) termasuk menilai kelayakan strategi manajemen dalam upaya untuk mengatasi kesulitan keuangan perusahaan. Auditor independen melakukan fungsi pengawasan atau monitoring atas pekerjaan manajer melalui sebuah sarana yaitu laporan keuangan, sehingga auditor akan melakukan proses audit terhadap kewajaran laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas termasuk catatan atas laporan keuangan yang kemudian akan memberikan pendapat atas pekerjaan auditnya dalam bentuk opini audit.

Auditor independen melakukan pengawasan atau *monitoring* karena manajer berkeinginan untuk menyajikan laporan keuangan agar tampak lebih baik dari kondisi senyatanya (Cosserat, 1999). Sejalan dengan pendekatan audit *top down holistic*, auditor berkewajiban untuk mengevaluasi resiko bisnis klien (Boynton, 2002).

Perusahaan yang mengalami *financial distress* memiliki resiko bisnis yang lebih besar. Oleh karena itu, auditor akan mempertimbangkan rencana dan tindakan strategik yang dilakukan manajemen, khususnya rencana manajemen yang terlalu optimistik (Hackenbrack dan Nelson, 1996).

Pengguna laporan keuangan akan mengambil keputusan ekonomi atas dasar laporan keuangan auditan. Oleh karena itu, opini tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan. Opini *going concern*, yang secara jelas menyebutkan adanya keraguan auditor akan kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya merupakan signal bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah *going concern*, seperti masalah kesulitan keuangan.

### **2.1.2 Teori Legitimasi**

Lindblom (1994) dalam Deegan (2002), mendefinisikan *legitimacy theory* sebagai berikut:

“... sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas dimana masyarakat menjadi bagiannya. Ketika suatu perbedaan, baik yang nyata atau potensial ada di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan.”

Dengan kata lain, teori legitimasi menurut Lindblom (1994) menyatakan bahwa, organisasi hanya dapat bertahan apabila masyarakat, dimana organisasi tersebut berada merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sama dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat.

Sedangkan Suchman dalam Tsang (1988) mendefinisikan *legitimacy theory* sebagai persepsi yang umum atau asumsi bahwa tujuan, metode operasi, dan output organisasi harus sesuai dengan norma dan nilai sosial. Sesuai dengan hal tersebut, maka sistem akuntabilitas dan akuntansi sosial menjadi penting bagi perusahaan.

*Legitimacy theory* menurut Guthrie dan Parker (1989) adalah organisasi mendasarkan operasi bisnisnya pada lingkungan sosial perusahaan melalui kontrak sosial yang disetujui dan berbagai keinginan masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas persetujuan organisasi dan keberlanjutan perusahaan. Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori *legitimacy* adalah “kontrak sosial” antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi (1974) dalam Ghozali dan Chariri (2007) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial bahwa:

“Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki”.

Jadi pada dasarnya setiap perusahaan memiliki kontrak implisit dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung didalam masyarakat. Biaya yang tinggi akan muncul disebabkan masyarakat menolak melegitimasi keberadaan perusahaan di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, perusahaan berusaha mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan cara melaksanakan program-program yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Deegan (2002) mengatakan bahwa pengertian yang diberikan oleh teori legitimasi (dan teori *stakeholder*) dibangun dari teori lain yaitu teori politik-ekonomi. “Politik ekonomi” sendiri telah didefinisikan oleh Gray *et al.*, (1996) dalam Deegan (2002) sebagai kerangka sosial, politik, dan ekonomi dimana manusia berada. Teori politik-ekonomi secara jelas mengakui konflik dan usaha yang terjadi antara beberapa kelompok dalam masyarakat. Prespektif yang dimasukkan dalam teori politik-ekonomi dan juga legitimasi adalah bahwa masyarakat, politik, dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dan isu-isu ekonomi tidak berarti apabila diteliti tanpa mempertimbangkan kerangka politik, sosial dan institusional dimana aktivitas ekonomi tersebut terjadi.

Praktik-praktik tanggung jawab sosial dan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk memenuhi harapan-harapan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan yang selalu berusaha untuk menyelaraskan diri dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan mengantisipasi terjadinya *legitimacy gap* maka perusahaan tersebut dapat terus dianggap sah dalam masyarakat dan dapat terus bertahan hidup.

Norma perusahaan selalu berubah mengikuti perubahan dari waktu ke waktu sehingga perusahaan harus mengikuti perkembangannya. Usaha perusahaan mengikuti perubahan untuk mendapatkan legitimasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan.

Proses untuk mendapatkan legitimasi berkaitan dengan kontrak sosial antara yang dibuat oleh perusahaan dengan berbagai pihak dalam masyarakat. Kinerja

perusahaan tidak hanya diukur dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, tetapi ukuran kinerja lainnya yang berkaitan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk mendapatkan legitimasi perusahaan memiliki insentif untuk melakukan kegiatan sosial yang diharapkan oleh masyarakat di sekitar kegiatan operasional perusahaan.

Kegagalan untuk memenuhi harapan masyarakat akan mengakibatkan hilangnya legitimasi dan kemudian akan berdampak terhadap dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan. Pengungkapan perusahaan melalui laporan keuangan tahunan merupakan usaha perusahaan untuk mengkomunikasikan aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat, sehingga kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Perusahaan akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kontrak sosial dengan masyarakat di sekitarnya.

### **2.1.3 Stakeholder Theory**

*Stakeholder* merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholder* jika memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan (Budimanta dkk, 2008). Konsep yang mendasari mengenai siapa saja yang termasuk dalam *stakeholder* perusahaan sekarang ini telah



berkembang mengikuti perubahan lingkungan bisnis dan kompleksnya aktivitas bisnis perusahaan.

*Stakeholder theory* menyatakan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para *stakeholder* dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan (Deegan, 2004). Hal ini disebabkan *stakeholder* dianggap dapat mempengaruhi tapi juga dapat dipengaruhi perusahaan. Menurut Gray, Kouhy, dan Adam (1994:53) dalam Chariri dan Ghozali (2007) mengatakan bahwa:

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan dari *stakeholder*, sehingga aktivitas perusahaan adalah mencari dukungan tersebut. Ada alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholder*, yaitu : Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka. Dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan. Para investor dapat menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan. LSM dan pecinta lingkungan makin vokal dalam mengkritik perusahaan-perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan”.

Gray (1987) menyebutkan bahwa, agar perusahaan mengetahui apa yang diinginkan oleh *stakeholder*, perusahaan harus dapat menilai *substantive environment* yang terdiri atas:

1. *Primary level* menggambarkan interaksi medium perusahaan manufaktur dengan lingkungan yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi pertanggungjawaban.

2. *Secondary level* menggambarkan interaksi sosial perusahaan dalam penggunaan infrastruktur, pengaruh estetika, kesehatan karyawan, dan kepuasan status, opsi konsumen dan kesejahteraan, advertensi, sampah sisa, teknologi baru, dan sumber-sumber serta *social opportunity cost*.
3. *Tertiary level* menggambarkan interaksi dalam sistem organisasional yang lebih kompleks, yaitu berhubungan dengan kualitas kebebasan, sikap (moral, pendidikan, budaya dan estetika), tingkat informasi (berita), warisan budaya, dunia kerja, sistem pilihan individu, kesehatan, lingkungan, dan sistem hukum yang adil.

Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Perusahaan menganggap bahwa peran para *stakeholder* sangat berpengaruh bagi perusahaan sehingga dapat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dalam mengungkapkan suatu informasi dalam laporan keuangan mereka. *Stakeholder* menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan karena mereka memegang posisi yang kuat dalam perusahaan. *Stakeholder* pada dasarnya dapat mempengaruhi pemakaian berbagai sumber ekonomi yang digunakan dalam aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, *stakeholder theory* umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan pengaruh *stakeholder* tersebut.

## 2.2 Akuntansi Lingkungan

### 2.2.1 Pengertian Akuntansi Lingkungan

Istilah akuntansi lingkungan mempunyai banyak arti dan kegunaan. Akuntansi lingkungan dapat mendukung akuntansi pendapatan, akuntansi keuangan, maupun bisnis internal akuntansi manajerial. Fokus utamanya didasarkan pada penerapan akuntansi lingkungan sebagai suatu alat komunikasi manajerial untuk pengambilan keputusan bisnis internal. Akuntansi lingkungan (*Environmental Accounting* atau *EA*) merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*environmental cost*) ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun non-keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan (Arfan Ikhsan, 2008:13).

Istilah akuntansi lingkungan sering digunakan di dalam literatur akuntansi maupun literatur manajemen lingkungan. Kebanyakan literatur akuntansi maupun manajemen lingkungan menjelaskan bahwa akuntansi lingkungan adalah suatu istilah yang lebih luas sehubungan dengan ketetapan dari pencapaian informasi lingkungan oleh para stakeholder baik di dalam maupun diluar organisasi (Arfan Ikhsan, 2008:15).

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United States Environment Protection agency* (US EPA) akuntansi lingkungan adalah:

“Suatu fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh para stakeholders perusahaan yang mampu mendorong dalam pengidentifikasian

cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan”.

Badan Perlindungan Amerika Serikat atau *United States Environmental*

*Protection Agency* (EPA) menambahkan lagi bahwa istilah akuntansi lingkungan dibagi menjadi dua dimensi utama. Pertama, akuntansi lingkungan merupakan biaya yang secara langsung berdampak pada perusahaan secara menyeluruh atau disebut juga biaya pribadi. Kedua, akuntansi lingkungan juga meliputi biaya-biaya individu, masyarakat maupun lingkungan suatu perusahaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan menurut Rob Gray (1993), akuntansi lingkungan yaitu:

1. Mengenali dan berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan negatif dari praktik akuntansi konvensional.
2. Secara terpisah mengidentifikasi biaya terkait lingkungan dan pendapatan dalam sistem akuntansi konvensional.
3. Mengambil langkah-langkah aktif untuk mengatur inisiatif untuk memperbaiki dampak lingkungan yang ada praktik akuntansi konvensional.
4. Merancang bentuk-bentuk baru dari sistem akuntansi keuangan dan non-keuangan, sistem informasi, dan sistem kontrol untuk lebih mendorong manajemen ramah lingkungan.
5. Developing bentuk-bentuk baru dari pengukuran kinerja, pelaporan, dan penilaian baik untuk puses internal dan eksternal.
6. Mengidentifikasi, memeriksa dan mencari untuk memperbaiki daerah yang kriteria konvensional (keuangan) dan kriteria lingkungan dalam konflik.

7. Bereksperimen dengan cara yang sustainability dapat dinilai dan perusahaan menjadi ortodoksi organisasi.

Akuntansi lingkungan menjadi hal yang penting untuk dapat dipertimbangkan dengan sebaik mungkin karena akuntansi lingkungan merupakan bagian dari akuntansi atau sub bagian akuntansi. Alasan yang mendasarinya adalah mengarah pada keterlibatannya dalam konsep ekonomi dan informasi lingkungan. Akuntansi lingkungan juga merupakan suatu bidang yang terus berkembang dalam mengidentifikasi pengukuran-pengukuran dan mengomunikasikan biaya-biaya aktual perusahaan atau dampak potensial lingkungannya (Arfan Ikhsan, 2008:15).

Sebelum informasi biaya lingkungan dapat diberikan kepada manajemen, biaya lingkungan harus didefinisikan. Dengan demikian, biaya lingkungan dapat disebut sebagai biaya kualitas lingkungan. Dalam arti yang sama dengan biaya kualitas, biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan karena kualitas lingkungan yang buruk ada atau karena kualitas lingkungan yang buruk mungkin ada. Dengan demikian, biaya lingkungan yang terkait dengan penciptaan, deteksi, perbaikan, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Dengan definisi ini, biaya lingkungan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu biaya pencegahan, biaya pendeteksian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal, pada gilirannya, dapat dibagi menjadi beberapa kategori maupun yang belum direalisasi (Hansen Mowen, 2007:780).

### 2.2.2 Tujuan Konsep Akuntansi Lingkungan

Tujuan dari akuntansi lingkungan adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya. Keberhasilan akuntansi lingkungan tidak hanya tergantung pada ketepatan dalam menggolongkan semua biaya-biaya yang dibuat perusahaan. Akan tetapi kemampuan dan keakuratan data akuntansi perusahaan dalam menekan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas perusahaan (Arfan Ikhsan, 2008:6).

Tujuan lain dari pentingnya pengungkapan akuntansi lingkungan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan oleh perusahaan maupun organisasi lainnya, yaitu mencakup kepentingan organisasi publik dan perusahaan-perusahaan publik yang bersifat lokal. Pengungkapan ini penting terutama bagi para stakeholders untuk dipahami, dievaluasi, dan dianalisis sehingga dapat memberi dukungan bagi usaha mereka.

Oleh karena itu, akuntansi lingkungan selanjutnya menjadi bagian dari suatu sistem sosial perusahaan. Di samping itu, maksud dan tujuan dikembangkannya akuntansi lingkungan antara lain meliputi:

1. Akuntansi lingkungan adalah sebuah alat manajemen lingkungan.
2. Akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat.

Sebagai alat manajemen lingkungan, akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi berdasarkan ringkasan dan klasifikasi biaya konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konservasi lingkungan dan

juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menilai tingkat keluaran dan capaian tiap tahun untuk menjamin perbaikan kinerja lingkungan yang harus berlangsung terus menerus (Arfan Ikhsan, 2008:6).

Secara garis besar, keutamaan penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan adalah kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapinya. Banyak perusahaan besar industry dan jasa yang kini menerapkan akuntansi lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environment cost*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*). Akuntansi lingkungan diterapkan oleh berbagai perusahaan untuk menghasilkan penilaian kuantitatif tentang biaya dan dampak perlindungan lingkungan (*environment protection*).

**Tabel 2.1**  
**Keutamaan Konsep Akuntansi Lingkungan**

	Evaluasi integrasi dampak lingkungan.
Penentuan Target	Identifikasi faktor-faktor utama yang berdampak pada lingkungan dan susun suatu target untuk mengurangi dampak lingkungan (tindakan perencanaan lingkungan).
Pertimbangan Pengukuran	Pilih alat ukur untuk mengurangi dampak lingkungan.
Penilaian Administrasi	Menghasilkan segmen akuntansi lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan untuk menetapkan target-target di masing-masing alat ukur (simulasi).
Memilih alat ukur	Menghasilkan segmen akuntansi untuk

	mengukur masing-masing divisi.
Implementasi alat ukur	Implementasi alat ukur di masing-masing divisi.
Review kinerja	Menghasilkan segmen akuntansi, evaluasi hasil dampak lingkungan dari implementasi alat-alat ukur, dan mengevaluasi kontribusinya yang dapat mendukung prestasi manajemen lingkungan.

Sumber: Arfan Ikhsan, November 2007. Akuntansi Lingkungan & Pengungkapannya.

Tabel 2.1 menjelaskan tujuh langkah dalam upaya mencapai keberhasilan dalam penerapan akuntansi lingkungan bagi perusahaan-perusahaan. Pertama, yang perlu diperhatikan manajemen perusahaan adalah adanya kesesuaian antara evaluasi yang dibuat perusahaan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Kedua, yaitu menentukan apa yang menjadi target perusahaan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berdampak pada lingkungan perusahaan, serta menyusun suatu perencanaan untuk mengurangi dampak lingkungan. Ketiga, memilih alat ukur yang sesuai dalam menentukan persoalan lingkungan. Keempat, melakukan penelitian administrasi untuk menetapkan target dimasing-masing segmen. Kelima, menghasilkan segmen akuntansi untuk mengukur masing-masing divisi perusahaan. Keenam, melakukan pengujian masing-masing divisi. Terakhir adalah melakukan telaah kinerja. Pada telaah kinerja diharapkan dapat menghasilkan segmen akuntansi yang dapat mendukung prestasi manajemen lingkungan di masing-masing divisi (Arfan Ikhsan, 2008:7-8).



Sebagai alat komunikasi dengan publik, akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik. Tanggapan dan pandangan terhadap akuntansi lingkungan dari berbagai pihak, pelanggan dan masyarakat digunakan untuk umpan balik untuk mengubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian atau pengelolaan lingkungan. Di dalam akuntansi lingkungan ada beberapa komponen pembiayaan yang harus dihitung, yaitu:

1. Biaya pencegahan lingkungan

Biaya pencegahan lingkungan adalah biaya kegiatan yang dilakukan untuk mencegah produksi kontaminan dan / atau limbah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Contoh kegiatan pencegahan meliputi berikut: mengevaluasi dan memilih pemasok, mengevaluasi dan memilih peralatan untuk mengontrol polusi, merancang proses dan produk untuk mengurangi atau menghilangkan kontaminan, pelatihan karyawan, mempelajari dampak lingkungan, risiko lingkungan audit, melakukan penelitian lingkungan, mengembangkan sistem manajemen lingkungan, produk daur ulang, dan memperoleh sertifikasi ISO 14001.

2. Biaya deteksi

Biaya deteksi lingkungan adalah biaya kegiatan dilaksanakan untuk menentukan apakah produk, proses, dan kegiatan lainnya dalam perusahaan yang sesuai

dengan standar lingkungan yang sesuai. Standar lingkungan dan prosedur bahwa perusahaan berusaha untuk mengikuti didefinisikan dalam tiga cara:

- 1) Undang-undang Peraturan pemerintah.
- 2) Standar Sukarela (ISO 14001) yang dikembangkan oleh Organisasi Standar Internasional.
- 3) Kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh manajemen.

Contoh kegiatan deteksi audit kegiatan lingkungan, memeriksa produk dan proses (untuk kepatuhan lingkungan), mengembangkan ukuran kinerja lingkungan, crrying keluar uji kontaminasi, memverifikasi kinerja lingkungan supplier, dan mengukur tingkat kontaminasi.

### 3. Biaya kegagalan internal lingkungan

Biaya kegagalan internal lingkungan adalah biaya kegiatan yang dilakukan karena kontaminan dan limbah telah diproduksi namun tidak dibuang ke lingkungan.

Dengan demikian, biaya kegagalan internal dikeluarkan untuk menghilangkan dan mengelola kontaminan atau limbah sekali dihasilkan. Kegiatan kegagalan internal memiliki satu dari dua golongan, yaitu:

- 1) Untuk memastikan bahwa kontaminan dan limbah yang dihasilkan tidak dilepaskan ke lingkungan.
- 2) Untuk mengurangi tingkat kontaminan dilepaskan ke jumlah yang sesuai dengan standar lingkungan.

Contoh kegiatan kegagalan internal termasuk peralatan operasi untuk meminimalkan atau menghilangkan polusi, mengobati dan membuang bahan beracun, pemeliharaan

peralatan polusi, fasilitas lisensi untuk memproduksi kontaminan, dan memo daur ulang.

#### 4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan

Biaya kegagalan eksternal lingkungan adalah biaya kegiatan yang dilakukan setelah pemakaian kontaminan dan limbah ke lingkungan. Realisasi biaya kegagalan eksternal adalah mereka dikeluarkan dan dibayar oleh perusahaan. Yang belum direalisasi biaya kegagalan eksternal (biaya sosial) yang disebabkan oleh perusahaan tetapi terjadi dan dibayar oleh pihak di luar perusahaan. Biaya sosial dapat lebih diklasifikasikan sebagai:

- 1) Mereka yang dihasilkan dari degradasi lingkungan
- 2) Mereka yang terkait dengan dampak negatif terhadap properti atau kesejahteraan individu.

#### 2.2.3 Menggunakan dan Manfaat EMA

EMA sangat bermanfaat untuk inisiatif manajemen internal dengan fokus lingkungan tertentu, seperti produksi bersih, manajemen rantai pasokan, "hijau" produk atau jasa desain, lingkungan pembelian yang lebih baik dan sistem manajemen lingkungan. Selain itu, tipe informasi akuntansi lingkungan semakin banyak digunakan untuk tujuan pelaporan eksternal. Dengan demikian, akuntansi lingkungan tidak hanya salah satu alat pengelolaan lingkungan. Sebaliknya, akuntansi lingkungan adalah satu set luas prinsip dan pendekatan yang menyediakan data penting mengenai keberhasilan kegiatan pengelolaan lingkungan (IFAC, 2005:23).

Dan, karena berbagai keputusan dipengaruhi oleh isu-isu lingkungan meningkat, maka akuntansi lingkungan menjadi lebih penting. Sehingga tidak hanya digunakan untuk keputusan manajemen lingkungan, tetapi untuk semua jenis kegiatan manajemen. Penggunaan dan manfaat spesifik akuntansi lingkungan, dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Penekanan pada Eco-efisiensi
2. Posisi Strategis di dua kategori paralel evolusi keseluruhan akuntansi manajemen untuk tidak hanya mencakup penyediaan informasi dan perencanaan manajemen dan kontrol,
3. Fokus pada efektif penggunaan sumber daya dan penciptaan nilai

Perlu dicatat bahwa tidak ada garis pemisah yang ketat di antara tiga kategori. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur yang mengurangi penggunaan air dan, dengan demikian, generasi air limbah melalui keefisiensi proyek mungkin juga mengurangi beban dan biaya pengobatan air limbah di rumah. Pabrik dipasang terutama untuk tujuan kepatuhan. Sisa dari bagian ini secara singkat membahas beberapa penggunaan yang menonjol dari EMA-tipe data yang dapat memiliki kepatuhan, eko-efisiensi dan manfaat strategis bagi organisasi (IFAC, 2005:24).

Salah satu daerah yang telah menerima banyak perhatian dari para peneliti dan praktisi EMA adalah penggunaan Pendekatan EMA Investasi Appraisal.<sup>21</sup> Investasi Appraisal adalah inti manajemen Teknik akuntansi yang menginformasikan baik keputusan organisasi rutin dan strategis. di bawah penilaian investasi, organisasi perlu mempertimbangkan semua biaya yang berpotensi relevan dan signifikan, termasuk

biaya yang berhubungan dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi laba atas investasi. memberikan contoh penggunaan perspektif EMA untuk menilai proyek-proyek investasi yang terkait dengan perbaikan eko-efisiensi dalam proses manufaktur, pengembangan produk baru dan pengurangan kewajiban lingkungan jangka panjang (IFAC, 2005:25).

#### **2.2.4 Informasi Fisik dan Indikator Kinerja Lingkungan**

Menurut IFAC (2005), informasi fisik tentang arus energi, air, bahan-bahan, dan barang sisa adalah penting di bawah akuntansi manajemen lingkungan, karena informasi tersebut membiarkan organisasi untuk menilai dan melaporkan bahan-bahan penting terkait dengan aspek-aspek kinerja lingkungan. Sebagai tambahan, biaya pembelian bahan-bahan adalah kunci berharga pada kebanyakan organisasi (halaman 30).

Sebagian besar informasi akuntansi secara fisik sayangnya tidak mudah tersedia untuk pegawai akuntansi. Sebagaimana tidak secara sistematis merekam atau tidak direkam yang mencerminkan arus dunia nyata dari bahan-bahan. Pegawai dari bidang-bidang lain, seperti produksi, operasi lain atau lingkungan, secara umum mempunyai perkiraan-perkiraan dan pengukuran-pengukuran yang lebih terperinci dari arus fisik bahan-bahan, tetapi serinng kali informasi ini tidak diperikasa ulang sesuai dengan apa yang ada pada department akuntansi.

Para akuntan perlu bekerja lebih giat dengan pegawai dari department lainnya agar lebih tetili mencatat sisi fisik akuntansi dari akuntansi menejemnt lingkungan.

Dibawah sisi fisik akuntansi dari akuntansi manajemen lingkungan, sebuah organisasi perlu mencoba untuk menjajaki semua masukan dan keluaran secara fisik dan memastikan sejumlah penting berupa energi, air atau bahan-bahan lain yang bersifat tidak dijelaskan.

Akuntansi untuk seluruh energi, air, bahan-bahan, dan barang sisa kedalam dan keluar organisasi disebut keseimbangan bahan-bahan, kadang-kadang juga disebut dengan infut-outfut balace, suatu mass belence, atau satu eco-balance. Banyak organisasi membentuk kseimbangan energy dan keseimbangan air secara terpisah dari bahan-bahan yang lainnya. Istilah ini mengungkapakan, asumsi dasar adalah memasukan secara fisik yang pada akhirnya harus menjadi keluaran-keluaran, juga produk-produk atau barang sisa secara fisik dan emisi serta antara masukan dan kluaran harus seimbang. Tingkat ketepatan dari keseimbangan bahan-bahan dapat bervariasi, tergantung pada tujuan-tujuan spsifik dari koleksi informasi dan ketersediaan serta mutu data.

Keseimbangann bahan-bahan dapat mengambil tempat pada beberpa tempat yang berbeda. Informasi fisik dapat dikumpulkan untuk suluruh organisasi, atau untuk lokasi-lokasi tertentu, bahan-bahan masukan, arus-arus barang sisa, bentuk proses-proses atau peralatan, produk atau jasa dan lain-lain, tergantung pada kegunaan informasi yang diharapkan. Idealnya, kesimbangan bahan-bahan yang dilaksanakan berdasarkan tingkat-tingakat yang lebih terperinci yang dikumpulkan seimbang untuk bahan-bahan yang dilaksanaakan dari lokasi atau organisasi secara keseluruhan.

Pada prakteknya, bagaimapun keseimbangan bahan-bahan pada tingkat yang berbeda sering kali tidak diperiksa ulang. Oleh karena itu, terjadi ketidakkonsistenan. Untuk melengkapi gambar yang terintegrasi dari penggunaan bahan-bahan, rincian arus bahan-bahan harus diurut diseluruh langkah-langkah manajemen organisasional yang berbeda, seperti bahan-bahan pengadaan, penyerahan, persediaan, daur ulang, perawatan, dan pembuangan, semua jumlah bahan-bahan yang seimbang digabungkan. Jenis akuntansi dapat mengacu pada arus bahan-bahan akuntansi.

Beberapa organisasi dapat memperluas batasan-batasan sistem diluar operasi mereka sendiri termasuk informasi fisik dari para pemasok, pelanggan, dan unsur-unsur lain dari jaringan penawaran, melakukan supply chain environmental management, atau daur hidup produk, dengan penilaian siklus hidup. Begitu data akuntansi secara fisik telah dikumpulkan, data tersebut dapat digunakan untuk mendukung sisi akuntansi biaya dari akuntansi manajemen lingkungan dan untuk menciptakan penunjuk prestasi lingkungan yang membantu satu organisasi untuk menilai dan melaporkan kinerja dari aspek lingkungan yang terkait dengan bahan-bahan.

Walaupun organisasi-organisasi tidak mempunyai keahlian atau sumber daya dalam melaksanakan bahan-bahan seluruhnya, keseimbangan atau arus bahan-bahan akuntansi dapat bermanfaat bagi penilaian. Dari sudut pandang dampak lingkungan, data absolute yang dikumpulkan merupakan data yang sangat penting. Ketika indicator absolute menggambarkan konsumsi sumber alam dan pembuatan barang sisa dan emisi, seperti: jumlah total dari air bersih yang dikonsumsi sepanjang tahun,

jumlah total dari sisa air yang dihasilkan sepanjang tahun. Indikator-indikator yang dihasilkan suatu kinerja lingkungan organisasi di istilahkan dengan ukuran, output produksi atau jumlah karya.

Hal ini menjadi jumlah indikator penting ketika ukuran perusahaan, produk atau output jasa beragam dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, indikator ini membolehkan organisasi untuk membedakan diantara perubahan-perubahan kinerja lingkungan sebagai hasil dari perubahan dalam faktor-faktor ini dan tantangan dalam kinerja sebagai suatu hasil dari usaha manajemen lingkungan. Contoh relative dari indikator-indikator ini meliputi:

1. Jumlah air bersih yang dikonsumsi per unit produk yang dihasilkan atau jasa yang disediakan.
2. Jumlah dari sisa air yang dihasilkan per unit produk yang dihasilkan atau jasa yang disediakan.

**Tabel 2.2**  
**Keterangan Rinci Akuntansi Lingkungan Fisik**

Bahan Masukan	Produk Keluaran
Bahanbakudanpembantu	Produk(termasuk Kemasan)
Bahan Kemasan	By-produk (termasuk Kemasan)
Persediaan atau barang dagangan	<b>Non-Produk Keluaran(Sampah dan emisi)</b>
Bahan Operasional	Limbah Padat
Air	Limbahberbahaya
Energi	Air Limbah
	Emisiudara

Sumber: *International Guidance Document. Environmental Management Accounting*

Kategori fisik yang dijelaskan dalam tabel 2.3 ini, sesuai dengan praktek standar massa balancing dan struktur umum ISO 14031. Untuk indikator kinerja



lingkungan dalam sistem operasional. Kategori fisik dapat disesuaikan sesuai kebutuhan sektor-sektor tertentu atau organisasi individu. Berikut ini rincian mengenai akuntansi lingkungan fisik:

#### 1. BahanMasukan

Bahan masukan adalah setiap energi, air atau bahan lain yang masuk ke perusahaan. Bahan masukan, terdiri dari:

##### 1) Bahan Baku dan Pembantu

Bahan baku adalah bahan masukan yang menjadi bagian dari akhir organisasi produk fisik atau produk. Bahan baku merupakan komponen produk utama, misalnya kayu yang digunakan dalam pembuatan furnitur. Sedangkan bahan tambahan adalah produk yang lebih kecil komponen, misalnya lem yang digunakan dalam pembuatan furnitur.

##### 2) Bahan Kemasan

Bahan kemasan adalah bahan masukan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengiriman akhir organisasi produk. Bahan-bahan ini dapat dibeli dalam bentuk siap pakai atau mungkin perlu diproses di tempat sebelum digunakan.

##### 3) Persediaan atau Barang Dagangan

Beberapa bisnis membeli barang-barang yang kemudian langsung dijual lagi sebagai produk, dengan sedikit atau tanpa pengolahan tambahan. Bahan masukan ini, dikategorikan sebagai barang dagangan. Contoh dampak lingkungan/biaya yang berkaitan dengan barang dagangan termasuk dampak

dan biaya energi untuk menyimpan dan menangani barang atau dampak dan biaya pembuangan barang dagangan, seperti makanan yang telah habis masa simpan yang berguna. Dalam kasus tersebut, bahan dagangan dan biaya terkait harus dilacak. Secara umum, namun karena barang tidak berjalan melalui jenis lini produksi, ada cenderung dampak lingkungan yang lebih sedikit dan lingkungan terkait biaya yang terkait dengan penanganan organisasi barang dagangan dibandingkan dengan bahan masukan lainnya.

#### 4) Bahan Operasi

Bahan operasi adalah bahan masukan yang diperoleh melalui pembelian dan digunakan oleh perusahaan, tetapi tidak menjadi bagian dari setiap produk fisik dikirim ke pelanggan. Contoh: perlengkapan kantor, bangunan membersihkan persediaan, perlengkapan pencahayaan, dan lain-lain. Untuk perusahaan non-manufaktur, sebagian besar bahan masukan berupa bahan operasi. Misal: bahan bakar untuk transportasi jasa.

#### 5) Air

Kategori air mencakup semua air yang digunakan organisasi dari semua sumber, seperti: air hujan, air tanah, air permukaan dari sungai dan danau, terlepas dari bagaimana air diperoleh, misalnya sumur pribadi atau sistem penyediaan air publik. Dalam beberapa sektor manufaktur, seperti pengolahan makanan, air dapat menjadi bagian dari produk fisik akhir, seperti bahan baku dan pembantu. Sedangkan air lainnya tidak pernah dikategorikan untuk menjadi produk akhir, tetapi digunakan untuk keperluan lain, seperti

pendingin atau membersihkan, seperti bahan operasi. Dengan demikian, air dapat keluar dari organisasi manufaktur dalam bentuk produk fisik, tetapi sisanya akan meninggalkan sebagai limbah atau emisi. Dalam organisasi non-manufaktur, semua air yang digunakan tidak seperti bahan operasi. Maka tidak dikategorikan ke produk akhir, tetapi digunakan sebagai bahan pendukung akhirnya keluar dari perusahaan menjadi limbah atau emisi. Air dalam kategori yang berbeda dari bahan masukan lainnya karena sangat penting dari perspektif lingkungan dan karena sistem akuntansi sering mengelola aliran air.

#### 6) Energi

Kategori Energi mencakup semua energi yang digunakan oleh perusahaan, seperti: perusahaan listrik, gas, batubara, bahan bakar minyak, pemanasan dan pendinginan kabupaten, biomassa, surya, angin dan air. Dalam beberapa operasi manufaktur, energi kadang-kadang dilihat sebagai sesuatu yang dikategorikan sebagai produk akhir, misalnya melalui reaksi kimia. Tetapi, energi lebih sering dipandang sebagai sebuah material operasi.

## 2. Produk Output

Produk keluaran adalah limbah atau bahan lain yang keluar dari perusahaan. Produk keluaran adalah produk fisik terkait yang dikirimkan kepada pelanggan. Produk keluaran dibagi menjadi dua, yaitu:

### 1) Produk (termasuk kemasan)

Produk mencakup produk fisik, seperti chip komputer yang diproduksi oleh electronic manufacturing perusahaan, termasuk kemasan.

## 2) By-Produk (termasuk kemasan)

By-produk adalah produk minor yang dihasilkan selama pembuatan primer produk. Semua oleh-produk yang menghasilkan laba, serta terkait dengan produk-kemasan. Penting untuk dicatat bahwa batas-batas antara produk, oleh-produk dan limbah, tidak didefinisikan dengan baik di beberapa perusahaan dan tergantung pada seberapa baik organisasi memisahkan oleh-produk dan limbah.

## 3. Non-Produk Keluaran

Setiap out put yang bukan merupakan produk keluaran, umumnya disebut Non-Produk Keluaran(NPO). NPO dibagi dalam empat bagian, yaitu:

### 1) Limbah Padat

Limbah padat didefinisikan sebagai limbah yang relatif tidak berbahaya dalam bentuk padat, seperti limbah kertas.

### 2) Limbah Berbahaya

Limbah berbahaya didefinisikan sebagai bahan limbah yang lebih berbahaya dalam bentuk padat, seperti baterai dibuang. Bentuk cair, seperti cat limbah dan pelarut. Bentuk campuran, seperti air limbah pengolahan lumpur. Tergantung pada konteks, "berbahaya" dapat didefinisikan sebagai menular, mudah terbakar, beracun atau karsinogenik.

### 3) Air Limbah

Air limbah didefinisikan sebagai aliran limbah utama yang berkomponen air, tetapi juga mengandung beberapa jenis kontaminan, seperti permintaan yang tinggi biologis oksigen (BOD), jumlah padatan tersuspensi (TSS), nutrisi (seperti fosfat), kelebihan panas dan bahan beracun (seperti pelarut, pestisida atau logam berat).

### 4) Emisi Udara

Emisi udara didefinisikan sebagai aliran udara yang terkontaminasi dengan tingkat polutan tinggi. Contoh polutan termasuk pembakaran energi oleh produk, seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, partikel yang dikonsumsi dan senyawa organik yang mudah menguap, serta lainnya polutan seperti partikulat logam. Emisi udara juga dapat mencakup radiasi, kebisingan dan panas.

#### **2.2.5 Informasi Moneter: Lingkungan Terkait Biaya dan Laba**

Sebelum informasi biaya lingkungan dapat diberikan kepada manajemen, biaya lingkungan harus didefinisikan. Berbagai kemungkinan yang ada; Namun, pendekatan yang menarik adalah dengan mengadopsi definisi yang konsisten dengan total model kualitas lingkungan. Dalam total model kualitas lingkungan, negara ideal adalah nol kerusakan lingkungan (analog dengan negara zero-defect manajemen kualitas total). Kerusakan didefinisikan sebagai degradasi langsung lingkungan, seperti emisi padat, cair, atau residu gas ke lingkungan (misalnya pencemaran air dan

polusi udara), atau degradasi langsung seperti penggunaan yang tidak perlu bahan dan energy (Hansen Mowen, 2007:780).

Dengan demikian, biaya lingkungan dapat disebut sebagai biaya kualitas lingkungan. Dalam arti yang sama dengan biaya kualitas, biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan karena kualitas lingkungan yang buruk ada atau karena kualitas lingkungan yang buruk mungkin ada. Dengan demikian, biaya lingkungan yang terkait dengan penciptaan, deteksi, perbaikan, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Dengan definisi ini, biaya lingkungan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori: biaya pencegahan, biaya pendeteksian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal, pada gilirannya, dapat dibagi menjadi beberapa kategori maupun yang belum direalisasi, yaitu:

1. Biaya pencegahan lingkungan adalah biaya kegiatan yang dilakukan untuk mencegah produksi kontaminan dan / atau limbah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Contoh kegiatan pencegahan meliputi berikut: mengevaluasi dan memilih pemasok, mengevaluasi dan memilih peralatan untuk mengontrol polusi, merancang proses dan produk untuk mengurangi atau menghilangkan kontaminan, pelatihan karyawan, mempelajari dampak lingkungan, risiko lingkungan audit, melakukan penelitian lingkungan, mengembangkan sistem manajemen lingkungan, produk daur ulang, dan memperoleh sertifikasi ISO 14001 (Hansen Mowen, 2007:780).
2. Biaya deteksi lingkungan adalah biaya kegiatan dilaksanakan untuk menentukan apakah produk, proses, dan kegiatan lainnya dalam perusahaan yang sesuai

dengan standar lingkungan yang sesuai. Standar lingkungan dan prosedur bahwa perusahaan berusaha untuk mengikuti didefinisikan dalam tiga cara:

- 1) Undang-undang Peraturan pemerintah.
- 2) Standar Sukarela (ISO 14001) yang dikembangkan oleh Organisasi Standar Internasional.
- 3) Kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh manajemen.

Contoh kegiatan deteksi audit kegiatan lingkungan, memeriksa produk dan proses (untuk kepatuhan lingkungan), mengembangkan ukuran kinerja lingkungan, crrying keluar uji kontaminasi, memverifikasi kinerja lingkungan supplier, dan mengukur tingkat kontaminasi.

3. Biaya kegagalan internal lingkungan adalah biaya kegiatan yang dilakukan karena kontaminan dan limbah telah diproduksi namun tidak dibuang ke lingkungan. Dengan demikian, biaya kegagalan internal dikeluarkan untuk menghilangkan dan mengelola kontaminan atau limbah sekali dihasilkan. Kegiatan kegagalan internal memiliki satu dari dua golongan:

- 1) Untuk memastikan bahwa kontaminan dan limbah yang dihasilkan tidak dilepaskan ke lingkungan.
- 2) Untuk mengurangi tingkat kontaminan dilepaskan ke jumlah yang sesuai dengan standar lingkungan. Contoh kegiatan kegagalan internal termasuk peralatan operasi untuk meminimalkan atau menghilangkan polusi, mengobati dan membuang bahan beracun, pemeliharaan peralatan polusi, fasilitas lisensi untuk memproduksi kontaminan, dan memo daur ulang.

4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan adalah biaya kegiatan yang dilakukan setelah pemakaian kontaminan dan limbah ke lingkungan. Realisasi biaya kegagalan eksternal adalah mereka dikeluarkan dan dibayar oleh perusahaan. Yang belum direalisasi biaya kegagalan eksternal (biaya sosial) yang disebabkan oleh perusahaan tetapi terjadi dan dibayar oleh pihak di luar perusahaan. Biaya sosial dapat lebih diklasifikasikan sebagai:

- 1) Mereka yang dihasilkan dari degradasi lingkungan.
- 2) Mereka yang terkait dengan dampak negatif terhadap properti atau kesejahteraan individu.

Dalam kedua kasus, biaya ditanggung oleh orang lain dan bukan oleh perusahaan, meskipun mereka disebabkan oleh perusahaan. Dari empat kategori biaya lingkungan, kategori kegagalan eksternal adalah yang paling dahsyat. Sebagai contoh, sebuah laporan oleh Environmental Protection Agency (EPA) menunjukkan bahwa biaya pembersihan swasta, di bawah Komprehensif Respon Lingkungan, Kompensasi, dan Kewajiban Undang-Undang 1980, telah lari ke puluhan miliar dolar dan diproyeksikan untuk akhirnya mencapai beberapa ratus miliar dolar. Selain itu, biaya pembersihan yang harus ditanggung oleh pembayar pajak juga akan berjalan dalam seratus miliar dolar.

Biaya pembersihan limbah pertahanan sendiri diperkirakan pada \$ 500 miliar. Contoh menyadari kegiatan kegagalan eksternal membersihkan danau tercemar, membersihkan tumpahan minyak, membersihkan tanah yang terkontaminasi, menggunakan bahan dan energi tidak efisien, menetap klaim cedera pribadi dari



praktek-praktek yang tidak sehat lingkungan, menetap klaim kerusakan properti, memulihkan lahan ke keadaan alami, andlosing penjualan dari reputasi lingkungan yang buruk. Contoh biaya sosial termasuk menerima perawatan medis karena tercemar udara (kesejahteraan individu), kehilangan sebuah danau untuk rekreasi karena kontaminasi (degradasi), kehilangan pekerjaan karena kontaminasi (kesejahteraan individu), dan ekosistem merusak dari pembuangan limbah padat (degradasi) (Hansen Mowen, 2007:781).

## **2.3 Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance*)**

### **2.3.1 Pengertian kinerja Lingkungan**

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*) (Suratno *et al.*,2006). Perusahaan memberikan perhatian terhadap lingkungan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Kinerja lingkungan dapat dilakukan dengan menerapkan akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan merupakan pengakuan dan integrasi dampak isu-isu lingkungan pada sistem akuntansi tradisional suatu perusahaan (Halim dan Irawan,1998).

Akuntansi lingkungan tidak hanya menghitung biaya dan manfaat ekonomi perusahaan, tetapi juga memperhitungkan biaya lingkungan yang merupakan eksternalitas ekonomi negatif atau biaya-biaya yang timbul di luar pasar. Kendala yang dihadapi oleh akuntansi lingkungan adalah belum adanya standar pengukuran dan penilaian dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan, sebab tidak semua

biaya dan manfaat lingkungan mudah diidentifikasi dan diukur dalam ukuran moneter (Halim dan Irawan, 1998).

Di Indonesia, kinerja lingkungan dapat diukur dengan menggunakan Program Penilaian Peringkat Kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, dengan jalan penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat (Laporan Hasil Penilaian PROPER, 2011:1).

Prinsip dasar dari pelaksanaan PROPER adalah mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrument insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan instrumen disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk. Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat berbagai instrumen pengelolaan lingkungan yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan, dan instrumen ekonomi.

Di samping itu, penerapan PROPER dapat menjawab kebutuhan akses informasi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan PROPER saat ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil PROPER dipublikasikan secara terbuka kepada publik dan *stakeholder* lainnya. Sistem peringkat kinerja PROPER mencakupi pemeringkatan perusahaan dalam 5 (lima) peringkat warna yang mencerminkan kinerja pengelolaan lingkungan secara keseluruhan, yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam. Melalui pemeringkatan warna ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami kinerja penataan masing-masing perusahaan. Sejauh ini dapat dikatakan bahwa PROPER merupakan sistem pemeringkatan yang pertama kali menggunakan peringkat warna. Lebih rincinya dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Peringkat PROPER**

Peringkat	Keterangan
Emas	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle dan Recovery), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan,serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat pada jangka panjang.
Hijau	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan lingkungan, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle dan Recovery).
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Hitam	Belum melakukan upaya lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan.

Sumber : Laporan PROPER periode 2006 – 2007

### 2.3.2 Tujuan Dan Sasaran PROPER

Tujuan dari pelaksanaan PROPER antara lain, sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan komitmen para *stakeholder* dalam upaya pelestarian lingkungan.
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha/kegiatan untuk menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan.
5. Meningkatkan penataan dalam pengendalian dampak lingkungan melalui peran aktif masyarakat.
6. Mengurangi dampak negatif kegiatan perusahaan terhadap lingkungan

Adapun sasaran dari pelaksanaan PROPER antara lain, sebagai berikut:

1. Mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui instrumen insentif dan disinsentif reputasi.
2. Mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*).

### 2.3.3 Strategi Pelaksanaan PROPER

Strategi yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan PROPER antara lain, sebagai berikut:

1. Paket informasi PROPER yang disampaikan harus dapat dengan mudah dimengerti oleh para stakeholder. Untuk memudahkan langkah-langkah proaktif para stakeholder maka peringkat kineija penataan perusahaan dalam PROPER dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat warna, yaitu:

1) Peringkat Emas

Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan.

2) Peringkat Hijau

Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Peringkat Biru

Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Peringkat Merah

Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Peringkat Hitam

Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan.

2. PROPER harus dilakukan oleh lembaga yang bersifat independen dan kredibel di mata para stakeholder. Untuk itu pelaksanaan PROPER dilakukan melalui pelibatan multi stakeholder.
3. PROPER perlu diarahkan kepada perusahaan yang peduli terhadap reputasi atau citranya di mata para stakeholdernya.
4. Pelaksanaan PROPER harus dilakukan secara bersama-sama dengan instrumen penataan lainnya, seperti; instrumen ekonomi dan instrument penegakan hukum, seperti Gambar 1 di sebelah ini.
5. Pelaksanaan PROPER ke depan harus melibatkan jumlah perusahaan yang lebih banyak sehingga dapat mencerminkan tingkat penataan perusahaan secara keseluruhan, dan tercapainya konsistensi serta berkeadilannya pengelolaan lingkungan di Indonesia.

6. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota agar pelaksanaan PROPER dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun landasan yang digunakan dalam pelaksanaan PROPER, yaitu:

- 1) Pengawasan pentaatan dalam pengelolaan lingk.hidup : UU No. 23/1997 pasal 22 (1).
- 2) Hak atas informasi lingkungan hidup : UU No. 23/1997 pasal 5 (2).
- 3) Hak masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup : UU No. 23/1997 pasal 5 (3) dan UU No.23/1997 pasal 7 (1).
- 4) Kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi : UU No. 23/1997 pasal 5 (2).

#### **2.3.4 Pihak-pihak Terkait Dalam Pelaksanaan PROPER**

Untuk mewujudkan *Good Environmental Governance* maka pelaksanaan PROPER dilakukan melalui pendekatan partisipatif *multi stakeholder*. Pelaksanaan PROPER secara teknis dilakukan oleh Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), namun dalam beberapa tahapan pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan partisipatif *multi stakeholder* yang meliputi tahap kegiatan, sebagai berikut:

1. Dalam tahapan persiapan dan perencanaan PROPER, dilakukan kegiatan sosialisasi dengan berbagai *stakeholder*, antar lain: Sektor terkait, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

2. Proses penilaian PROPER dilakukan melalui beberapa tahapan pengkajian teknis di internal KLH (*peer review*), dimulai dari Tim Teknis PROPER KLH yang terdiri dari para Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), para Eselon I KLH dan masukan dan para anggota Dewan Pertimbangan PROPER. Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan PROPER terdiri dari berbagai elemen masyarakat, yaitu: Pemerintah, Tokoh masyarakat yang kredibel, Perguruan Tinggi / Pakar Lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
3. Hasil penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan disampaikan secara transparan sehingga masyarakat dan atau *stakeholder* lainnya dapat bereaksi terhadap informasi tersebut sesuai dengan kapasitasnya.

### **2.3.5 Mekanisme PROPER**

Pelaksanaan PROPER diawali dengan pemilihan perusahaan peserta, dimana perusahaan yang menjadi target peserta PROPER adalah perusahaan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, tercatat di pasar bursa, mempunyai produk yang berorientasi ekspor atau digunakan oleh masyarakat luas. Setelah peserta ditetapkan, kemudian dilakukan pengumpulan data swapantau dengan jalan mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang disampaikan perusahaan.

Selain data swapantau juga dilakukan pengumpulan data primer dengan jalan melakukan pengawasan langsung kelapangan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Informasi yang terkumpul kemudian



diolah menjadi raport sementara, yang berisi evaluasi kinerja perusahaan dibidang pengelolaan air, udara, limbah B3 dibandingkan kriteria penilaian PROPER yang ditetapkan.

Rapot sementara ini sudah mengindikasikan peringkat kinerja perusahaan berdasarkan kriteria peringkat PROPER. Rapot sementara kemudian dibahas melalui mekanisme *peer review* oleh tim teknis. Hasil pembahasan dilaporkan kepada pejabat Eselon I KLH untuk mendapat komentar dan pertimbangan. Setelah itu raport dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan untuk mendapat pendapat dan persetujuan Dewan. Rapot hasil pembahasan dengan Dewan ini kemudian untuk ditetapkan sebagai Rapot Sementara yang akan disampaikan kepada perusahaan dan pemerintah daerah.

Perusahaan dan pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan dengan didukung data-data baru yang sah. Setelah masa sanggah dilewati, maka hasilnya dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan. Dewan akan memberikan pendapat terakhir mengenai status kinerja perusahaan sebelum dilaporkan kepada Menteri. Menteri memeriksa, memberikan kebijakan dan menetapkan status peringkat kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan laporan dari Dewan Pertimbangan. Mekanisme PROPER telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### 2.3.6 Kriteria Dan Prosedur Penilaian PROPER

Peringkat kinerja PROPER berorientasi kepada hasil yang telah dicapai perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang mencakupi 7 (tujuh) aspek yaitu:

1. Pentaatan terhadap peraturan pengendalian pencemaran air
2. Pentaatan terhadap peraturan pengendalian pencemaran udara
3. Pentaatan terhadap peraturan pengelolaan Limbah B3
4. Pentaatan terhadap peraturan AMDAL
5. Sistem Manajemen Lingkungan
6. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya
7. Community Development, Participation, dan Relation

Dasar penilaian dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*) yang sudah dicapai oleh perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, dititikberatkan pada 4 (empat) area penilaian utama dengan metode sistem gugur, sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Dasar Nilai Penilaian PROPER**

No	Area Penilaian	Dasar Nilai
1	Pengendalian Pencemaran Air dan Laut	Baku Mutu Parameter Kunci
2	Pengendalian Pencemaran Udara	Baku Mutu per Parameter Kunci
3	Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah B3	Izin dan Progres Pengelolaan Terukur
4	Persyaratan AMDAL	Progres Penataan RKL / RPL

Uraian aspek teknis dalam penilaian PROPER ditinjau pada beberapa aspek antara lain aspek pencemaran air, pencemaran udara, limbah B3 dan AMDAL/UKL/UPL. Untuk lebih memahami aspek teknis penilaian PROPER untuk tiap-tiap peringkat dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.5**  
**Aspek Teknis Penilaian PROPER untuk Peringkat Hitam**

<b>HITAM</b>	
<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>
Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan tidak mempunyai IPAL (apabila diperlukan),</li> <li>2. Perusahaan tidak melakukan pengolahan air limbah.</li> <li>3. Air limbah &gt; 500% dari BMAL (izin).</li> </ol>
Pencemaran Udara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan tidak mempunyai alat pengendalian pencemaran udara (apabila diperlukan).</li> <li>2. Perusahaan tidak melakukan pengendalian pencemaran udara.</li> <li>3. Emisi udara &gt; 500 % dari BME (izin).</li> </ol>
Pengelolaan Limbah B3	Perusahaan tidak mengelola limbah B3 dan mempunyai dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
AMDAL/UKL/UPL	Perusahaan tidak mempunyai dokumen AMDAL atau RKL/RPL yang disetujui instansi yang berwenang.

**Tabel 2.6**  
**Aspek Teknis Penilaian PROPER untuk Peringkat Merah**

<b>MERAH</b>	
<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>
Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan belum mempunyai izin pembuangan air limbah (apabila telah diwajibkan).</li> <li>2. Perusahaan melakukan pengambilan contoh dan analisis air limbah kurang dari sekali per bulan.</li> <li>3. Perusahaan belum melakukan pelaporan hasil pemantauan air limbah sebagaimana yang dipersyaratkan (per 3 bulan) kepada instansi terkait.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Perusahaan belum mempunyai alat ukur debit atau alat ukur debit tidak berfungsi dengan baik.</li> <li>5. Tidak dilakukan pengukuran debit harian.</li> <li>6. Konsentrasi air limbah belum memenuhi BMAL atau yang persyaratan yang ditetapkan di dalam izin</li> </ol>
Pencemaran Air Laut	Perusahaan belum mempunyai izin untuk pembuangan limbah ke laut (dumping).
Pencemaran Udara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stack yang mengeluarkan emisi belum dilengkapi dengan tempat pengambilan sample emisi udara dan peralatan pendukung lainnya.</li> <li>2. Stack yang ada belum dilengkapi dengan alat pemantauan udara sebagaimana yang dipersyaratkan (tergantung jenis industri).</li> <li>3. Belum dilakukan pengukuran emisi udara untuk semua stack sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan (harian atau setiap 6 bulan).</li> <li>4. Perusahaan tidak melaporkan hasil pemantauan emisi udara kepada instansi terkait sebagaimana mestinya.</li> <li>5. Emisi udara yang dihasilkan belum memenuhi Baku Mutu Emisi Udara sebagaimana yang dipersyaratkan.</li> </ol>
Pengelolaan Limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan belum mempunyai semua izin pengelolaan limbah B3 yang dilakukan untuk semua aspek sebagaimana yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Perusahaan belum melakukan pelaporan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>3. Penyimpanan limbah B3 belum dilakukan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam izin.</li> <li>4. Pengolahan limbah B3 di lokasi (on</li> </ol>

	<p>site incinerator) belum dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</p> <p>5. Pengolahan limbah B3 di lokasi (on site landfill) belum dikelola dengan baik dan sesuai dengan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam izin.</p>
AMDAL/UKL/UPL	<p>1. Perusahaan belum melakukan persyaratan persyaratan di dalam AMDAL dan RKL/RPL.</p> <p>2. Perusahaan tidak melakukan pelaporan UKL atau UPL kepada instansi terkait sebagaimana yang dipersyaratkan.</p>

Tabel 2.7

**Aspek Teknis Penilaian PROPER untuk Peringkat Hijau**

<b>HIJAU</b>	
<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>
Pencemaran Air	<p>1. Perusahaan telah melakukan kegiatan swapantau air limbah dan melaporkan hasil swa-pantau air limbah kepada instansi terkait (paling tidak 20 data swa-pantau per bulan).</p> <p>2. IPAL yang ada terawat dan berfungsi dengan baik.</p> <p>3. Konsentrasi air limbah yang dihasilkan &lt; 50% BMAL (izin).</p> <p>4. Beban pencemaran yang dihasilkan &lt; 50% BMAL (izin).</p>
Pencemaran Udara	<p>1. Emisi udara &lt; 50 BME.</p> <p>2. Peralatan pengendalian pencemaran udara terawat dengan baik.</p>
Pengelolaan Limbah B3	Perusahaan telah melakukan minimisasi limbah B3 lebih dari 50% dari total limbah B3 yang dihasilkan.
Penggunaan Sumber Daya	<p>1. Perusahaan telah mempunyai system pengelolaan sumber daya yang baik.</p> <p>2. Perusahaan telah melakukan housekeeping dengan baik.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Perusahaan telah melakukan penggunaan dan konservasi energi dengan efisien.</li> <li>4. Perusahaan telah melakukan penggunaan konservasi air dengan baik.</li> <li>5. Penggunaan bahan baku yang efisien</li> </ol>
Sistem Manajemen Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan mempunyai komitmen dan kebijakan lingkungan yang kuat.</li> <li>2. Perusahaan mempunyai organisasi pengelolaan lingkungan yang layak untuk mencapai target dan objektif pengelolaan lingkungan yang ada.</li> <li>3. Perusahaan mempunyai STD (system tanggap darurat) yang baik.</li> </ol>
Partisipasi dari Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan mempunyai organisasi yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengembangan dan partisipasi masyarakat.</li> <li>2. Perusahaan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan disekitar lokasi kegiatan perusahaan.</li> <li>3. Perusahaan mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan.</li> <li>4. Perusahaan mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak path masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol>

**Tabel 2.8**

**Aspek Teknis Penilaian PROPER untuk Peringkat Emas**

<b>EMAS</b>	
<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>
Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsentrasi air limbah yang dihasilkan &lt; 5% dari BMAL (izin).</li> <li>2. Beban pencemaran air limbah &lt; 5% BMAL (izin).</li> </ol>

Pencemaran Udara	Emisi udara < 5% Baku Mutu Emisi Udara.
Pengelolaan Limbah B3	Perusahaan telah melakukan upaya minimisasi limbah B3 lebih dari 95% dari total limbah B3 yang dihasilkan.
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Perusahaan telah melakukan kegiatan pengembangan masyarakat.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

1. Akuntansi Manajemen Lingkungan, Alat Bantu Untuk Meningkatkan Kinerja Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan.

Dian Imanina Burhany Nurniah (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman manajemen mengenai pentingnya kinerja lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi informasi akuntansi manajemen lingkungan yang dibutuhkan manajemen, mengetahui pemahaman akuntan mengenai akuntansi manajemen lingkungan, dan mengukur efektifitas akuntansi manajemen lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Metode analisis adalah deskriptif verifikatif dengan alat analisis regresi sederhana. Sampel penelitian adalah 28 perusahaan manufaktur di kota Bandung dan Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Manajemen cukup memahami pentingnya kinerja lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan.
- 2) Informasi akuntansi manajemen lingkungan yang paling dibutuhkan oleh manajemen adalah informasi jumlah energi yang dikonsumsi, jumlah limbah

yang dibuang, dihasilkan dan diolah, biaya mengevaluasi dan memilih peralatan pengolah limbah, biaya pengembangan sistem, serta biaya audit, regulasi dan limbah.

3) Akuntan manajemen cukup paham mengenai akuntansi manajemen lingkungan.

4) Akuntansi manajemen lingkungan efektif untuk meningkatkan kinerja lingkungan.

## 2. Tinjauan Teoritis Biaya Lingkungan Terhadap Kualitas Produk Dan Konsekuensinya Terhadap Keunggulan Kompetitif Perusahaan.

Eric Gunawan (2012) melakukan penelitian mengenai peranan biaya lingkungan terhadap kualitas produk dan konsekuensinya terhadap keunggulan kompetitif perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan biaya lingkungan dalam perusahaan membantu manajemen untuk mengambil kebijakan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas dan nilai produk dan dapat mengidentifikasi berbagai sumber-sumber pemborosan dan limbah yang selama ini menyebabkan produksi tidak efisien. Sebab limbah merupakan ketidakefisienan proses yang harus ditanggung sebagai biaya produk. Dengan melakukan perbaikan berkelanjutan tersebut mendorong perusahaan untuk mempunyai keunggulan kompetitif.

## 3. *Analysis Environmental accounting: A Management Tool For Enhancing Corporate Environmental and Economic Performance*



Patrick de Beer, Francois Friend (2005) melakukan penelitian pada industri rokok dengan studi kasus yang dilakukan pada penilaian siklus hidup dari unit fungsional dari satu juta batang. Penelitian ini menggunakan model EEGECOST yang dikembangkan untuk mempromosikan akuntansi lingkungan di Afrika Selatan. Pelaksanaan model akan memberikan industri Afrika Selatan dengan Kerangka untuk evaluasi perusahaan investasi alternatif, proyek dan proses dan untuk memperkirakan ekonomi dan kinerja lingkungan saat inidan terutama di masa depan. Model ini mengidentifikasi, catatan dan mengalokasikan biaya lingkungan internal dan biaya lingkungan eksternal untuk lima jenis biaya diidentifikasi, dikategorikan dalam beberapa kelompok media lingkungan. Hal ini juga membantu dalam proses penganggaran modal untuk investasi alternatif. Model ini menunjukkan bahwa biaya tipe V (biaya eksternal, dengan Jenis I sampai IV menjadi jenis biaya internal yang berbeda) memberikan kontribusi 12% dari total biaya produksi unit fungsional rokok. Sebagai biaya tipe V bersifat subjektif, dianjurkan bahwa penelitian lebih lanjut akan dilakukan untuk menyusun kerangka tujuan untuk mengevaluasi dan menentukan faktor biaya yang terlibat dalam pengembangan biaya tipe V.

#### 4. *Environmental Management and Regulation: Pitfalls of Environmental Accounting?*

Enrico Bracci & Laura Maran (2013) penelitian ini berkaitan dengan potensi akuntansi untuk membuat hal-hal yang terlihat dan terukur (Hines, 1988; Hopwood, 1992), dan kesediaan untuk mengambil kesempatan ini untuk

memecahkan urgensi masalah lingkungan. Analisis berkonsentrasi pada sistem akuntansi untuk pelaporan keuangan sebagai gateway istimewa untuk terlibat dalam kesadaran lingkungan dari suatu perusahaan. Makalah mengidentifikasi beberapa potensi akuntansi perusahaan untuk merespon isu-isu lingkungan diruangan terbuka dibiarkan terbuka melalui resep normatif dan IFRS. Kertas bertujuan memberikan kontribusi bagi perdebatan yang sebenarnya pada sistem manajemen lingkungan, melalui analisis rinci dan mendalam dari lokus akuntansi isu-isu lingkungan. Praktek akuntansi lingkungan telah mendapat perhatian khusus dalam terungkap kepedulian sosial progresif terhadap kerusakan lingkungan, karena kegiatan produktif organisasi. Kebijakan Eropa pada ISO 14001 dan EMAS mencurahkan penekanan rinci tentang sistem pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Namun demikian, wacana politik tampaknya longgar digabungkan dengan pengakuan keuntungan nyata dan terukur. Oleh karena itu, tantangan batas dari setiap perusahaan dalam ruang (masuknya pemangku kepentingan eksternal dan mereka sendiri evaluasi) dan dalam waktu (efek jangkapanjang). Salah satu isu utama pro-aktif pengelolaan lingkungan adalah "internalisasi" dari merusak "eksternalitas".

5. *The Relationship Between Provide Environmental Accounting Information and Improve Management Performance of the Companies Accepted in the Tehran Stock Exchange (Case Study for Companies in the Pharmaceutical Industry)*  
Siroos Fakhimi Azar, Robab Shahbazi, Saleheh Abdi Masoom Abad, dan Seyed

Nader Mousavi (2014) melakukan sebuah penelitian bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara penyediaan informasi akuntansi lingkungan dan improvisasi pengelolaan prestasi perusahaan dari industri farmasi diterima di Tehran Stock. Penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi statistik penelitian ini adalah contoh dari 30 industri farmasi perusahaan diterima di Tehran Stock. Data yang diperlukan untuk penelitian telah dikumpulkan melalui daftar pertanyaan yang terdiri atas 16 pertanyaan pada tanggal informasi akuntansi lingkungan peningkatan kinerja untuk data analisis, metode korelasi tersebut telah digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antar penyediaan informasi akuntansi lingkungan dan meningkatkan manajemen prestasi perusahaan diterima di Tehran Stock. Hasil uji menunjukkan bahwa:

- 1) Semua hipotesis telah dikonfirmasi sehingga penyediaan informasi akuntansi lingkungan secara positif berkaitan dengan meningkatkan manajemen kinerja bagi perusahaan farmasi.
- 2) Untuk hipotesis kedua juga layak disebut bahwa karena tingkat signifikansi yang dihasilkan (0,03), dapat dikatakan dengan keyakinan bahwa penyediaan informasi akuntansi lingkungan berkorelasi positif dengan analisis biaya.
- 3) Hasil uji statistik untuk hipotesis ketiga menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara penyediaan informasi akuntansi lingkungan dan evaluasi investasi pada tingkat signifikansi (0,04).
- 4) Untuk hipotesis keempat, dapat dikatakan bahwa penyediaan informasi akuntansi lingkungan diperoleh tingkat signifikan (0,02), oleh karena itu,

penyediaan informasi akuntansi lingkungan secara positif terkait dengan realisasi tujuan organisasi.

Mengingat hipotesis didiskusikan dan dikonfirmasi di penelitian ini, *establishment* dari akuntansi lingkungan bisa berperan penting dalam meningkatkan pengelolaan prestasi. Akibatnya performen dari perusahaan farmasi yang akhirnya menyebabkan meningkatnya kuantitas dan layanan kualitas dari perusahaan farmasi, karena menyediakan laporan keuangan secara tepat untuk manajer dalam rangka membuat keputusan yang optimal. Untuk meningkatkan informasi penyediaan akuntansi lingkungan dalam perusahaan farmasi, dalam pemesan untuk meningkatkan kinerja mereka, manajer perlu mengembangkan kebijakan yang efektif untuk memberikan informasi akuntansi lingkungan yang mengarah pada performen yang lebih baik dalam jangka panjang.

6. *The Benefits of Improved Environmental Accounting: An Economic Framework to Identify Priorities*

James Boyd (1998) penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor swasta. Dimana peningkatan akuntansi lingkungan semakin dilihat oleh para manajer perusahaan dan pendukung lingkungan sama sebagai pelengkap yang diperlukan untuk perbaikan pengambilan keputusan lingkungan dalam sektor swasta. Penelitian ini mengembangkan pendekatan ekonomi ke evaluasi manfaat akuntansi lingkungan dan berasal nilai, dan faktor-faktor penentu, dari informasi akuntansi ditingkatkan dalam beberapa konteks produksi dan penganggaran modal. Menggunakan konsep dari ekonomi manajerial, keuangan, dan teori

organisasi, analisis mengidentifikasi jenis perbaikan akuntansi lingkungan yang paling mungkin untuk menghasilkan keuntungan finansial dan lingkungan yang signifikan.

7. Peran Akuntansi Lingkungan Dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan.

Yoshi Aniela (2012) dengan studi kasus pada PT Lippo Cikarang Tbk dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Lippo Cikarang Tbk yang melakukan penanaman pohon di area perumahan yang dibangun dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka gerakan penanaman 1 miliar pohon. PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang melakukan aktivitas penanaman pohon pada hari Anak Nasional pada tahun 2010, di mana tujuan aktivitas tersebut adalah untuk menjaga kelestarian hidup, menunjang sektor pendidikan lingkungan dan kesehatan.

Seiring dengan meningkatnya kerusakan lingkungan dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan maka perusahaan sebagai bagian dari lingkungan juga dituntut untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Perusahaan itu sendiri merupakan badan hukum yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaannya kepada *shareholders* dan *stakeholders*, maka manajemen harus mampu menunjukkan kinerja yang baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan kinerja finansial dan kinerja lingkungannya.

Oleh karena itu, ketika perusahaan melaksanakan aktivitas yang mendukung pengelolaan lingkungan, maka pihak manajemen harus secara bijaksana melakukan pencatatan terhadap setiap biaya yang dikeluarkan terkait dengan aktivitas lingkungan tersebut. Biaya tersebut disebut sebagai biaya lingkungan yang harus dibebankan pada fungsi-fungsi dalam perusahaan secara tepat, misalnya, fungsi produksi, fungsi pemasaran dan sebagainya. Dengan demikian, pertanggungjawabannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan menjadi mudah. Pola pencatatan biaya lingkungan dalam akun laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan ini disebut sebagai *green accounting*.

Terkait dengan penerapan *green accounting* tersebut maka perusahaan akan bisa mengikuti alur biaya tersebut digunakan untuk lini produk yang mana, sehingga perusahaan, *shareholders*, dan *stakeholders* bisa mengetahui besaran beban yang dikeluarkan dengan capaian laba dan penjualan perusahaan.

Di mana berdasarkan praktik di lapangan, kajian literatur, serta penelitian empiris dan akademis diketahui bahwa penerapan *green accounting* memiliki dampak positif terhadap kinerja finansial perusahaan, yaitu meningkatnya persepsi positif dari konsumen yang berakhir pada peningkatan penjualan dan laba perusahaan. Selain berdampak pada kinerja finansial, penerapan *green accounting* juga berdampak pada peningkatan kinerja lingkungan baik dalam dimensi *environmental health* maupun dalam *environment vitality*. Peningkatan kinerja lingkungan ini disebabkan oleh adanya kerelaan dari perusahaan untuk mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah dan tuntutan konsumen untuk

mendapatkan produk yang berorientasi lingkungan. Untuk mempermudah dalam memahami isi dalam penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis menyajikan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dalam sebuah tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Rangkuman Penelitian-penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
1.	Dian Imanina Burhany Nurniah (2012)	Akuntansi Manajemen Lingkungan, Alat Bantu Untuk Meningkatkan Kinerja Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan.	Akuntansi Manajemen Lingkungan, Kinerja Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan	Deskriptif Verifikatif dan regresi sederhana	1) Manajemen cukup memahami pentingnya kinerja lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. 2) Informasi akuntansi manajemen lingkungan yang paling dibutuhkan oleh manajemen adalah informasi jumlah energi yang dikonsumsi, jumlah limbah yang dibuang, dihasilkan dan diolah, biaya mengevaluasi dan memilih peralatan pengolah limbah, biaya pengembanga

				<p>n sistem, serta biaya audit, regulasi dan limbah.</p> <p>3) Akuntan manajemen cukup paham mengenai akuntansi manajemen lingkungan.</p> <p>4) Akuntansi manajemen lingkungan efektif untuk meningkatkan kinerja lingkungan.</p>
2.	Eric Gunawan (2012)	Tinjauan Teoritis Biaya Lingkungan Terhadap Kualitas Produk Dan Konsekuensinya Terhadap Keunggulan Kompetitif Perusahaan.	Biaya Lingkungan, Kualitas Produk, Keunggulan Kompetitif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan biaya lingkungan dalam perusahaan membantu manajemen untuk mengambil kebijakan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas dan nilai produk dan dapat mengidentifikasi berbagai sumber-sumber pemborosan dan limbah yang selama ini menyebabkan produksi tidak efisien. Sebab limbah</p>



					merupakan ketidakefisienan proses yang harus ditanggung sebagai biaya produk.
3.	Patrick de Beer, Francois Friend (2005)	<i>Analysis Environmental Accounting: A Management Tool For Enhancing Corporate Environmental and Economic Performance</i>	Capital budgeting; Environmental Accounting; Environmental media; External costs; Internal costs	model EE GECOST	biaya tipe V (biaya eksternal, dengan Jenis I sampai IV menjadi jenis biaya internal yang berbeda) memberikan kontribusi 12% dari total biaya produksi unit fungsional rokok. Sebagai biaya tipe V bersifat subjektif, dianjurkan bahwa penelitian lebih lanjut akan dilakukan untuk menyusun kerangka tujuan untuk mengevaluasi dan menentukan faktor biaya yang terlibat dalam pengembangan biaya tipe V.
4.	Enrico Bracci & Laura Maran (2013)	<i>Environmental Management and Regulation: Pitfalls of Environmental Accounting?</i>	Environmental, Accounting, Regulation	Kertas Kerja Konseptual	Praktek akuntansi lingkungan telah mendapat perhatian khusus dalam terangnya kepedulian sosial progresif terhadap

				kerusakan lingkungan, karenakegiatan produktif organisasi. Kebijakan Eropa pada ISO 14001 dan EMASmencurahkan penekanan rinci tentang sistem pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
5.	Siroos Fakhimi Azar, Robab Shahbazi, Saleheh Abdi Masoom Abad, dan Seyed Nader Mousavi (2014)	<i>The Relationship Between Provide Environmental Accounting Information and Improve Management Performance of the Companies Accepted in the Tehran Stock Exchange (Case Study for Companies in the Pharmaceutical Industry)</i>	Environmental Accounting, Performance Improvement Management, Costing Analysis, Investment Evaluation, Realization of Organizational Goals	Hasil ujimenunjukkan bahwa: 1) Semuahipotesis telah dikonfirmasi sehingga penyediaan informasi lingkungan secara positif berkaitan dengan meningkatkan manajemen kinerja bagi perusahaan farmasi. 2) Untuk hipotesis kedua jugalah dikatakan bahwa karena tingkat signifikansinya

					<p>dihasilkan(0,03), dapat dikatakan dengan keyakinan bahwa penyediaan informasi lingkungan ber korelasi positif dengan analisis biaya.</p> <p>3) Hasil uji statistik untuk hipotesis ketiga menunjukkan bahwa ada hubungan positif antar penyediaan informasi lingkungan dan evaluasi investasi pada tingkat signifikansi(0,04).</p> <p>4) Untuk hipotesis keempat, dapat dikatakan bahwa penyediaan informasi lingkungan diperoleh tingkat signifikan(0,02), oleh karena itu, penyediaan</p>
--	--	--	--	--	--

					informasi akuntansi lingkungan secara positif terkait dengan realisasi tujuan organisasi.
6.	James Boyd (1998)	<i>The Benefits of Improved Environmental Accounting: An Economic Framework to Identify Priorities</i>	Environmental Accounting, Capital Investment, Corporate Decision-Making		Menggunakan konsep dari ekonomi manajerial, keuangan, dan teori organisasi, analisis mengidentifikasi jenis perbaikan akuntansi lingkungan yang paling mungkin untuk menghasilkan keuntungan finansial dan lingkungan yang signifikan.
7.	Yoshi Aniela (2012)	Peran Akuntansi Lingkungan Dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan.	<i>Green Accounting, Akuntansi Lingkungan, Kinerja Keuangan, Kinerja Lingkungan</i>		penerapan <i>green accounting</i> memiliki dampak positif terhadap kinerja finansial perusahaan, yaitu meningkatnya persepsi positif dari konsumen yang berakhir pada peningkatan penjualan dan laba perusahaan. Selain berdampak pada kinerja finansial, penerapan <i>green</i>

					<p><i>accounting</i> juga berdampak pada peningkatan kinerja lingkungan baik dalam dimensi <i>environmental health</i> maupun dalam <i>enviormnet vitality</i>. Peningkatan kinerja lingkungan ini disebabkan oleh adanya kerelaan dari perusahaan untuk mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah dan tuntutan konsumen untuk mendapatkan produk yang berorientasi lingkungan.</p>
--	--	--	--	--	---

Sumber: Data diolah

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada pengaruh akuntansi lingkungan terhadap kinerja lingkungan, yang mana akuntansi lingkungan pada dasarnya menuntut kesadaran penuh perusahaan-perusahaan maupun organisasi lainnya yang telah mengambil manfaat dari lingkungan. Penting bagi perusahaan-perusahaan atau organisasi lainnya agar dapat meningkatkan usaha dalam mempertimbangkan konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan

mendorong kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapinya.

Banyak perusahaan besar industri dan jasa yang kini menerapkan akuntansi lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environmental costs*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*). Akuntansi lingkungan diterapkan oleh berbagai perusahaan untuk menghasilkan penilaian kuantitatif tentang biaya dan dampak perlindungan lingkungan (*environmental protection*).

Beberapa alasan kenapa perusahaan perlu untuk mempertimbangkan untuk mengadopsi akuntansi lingkungan sebagai bagian dari sistem akuntansi perusahaan, antara lain: memungkinkan untuk mengurangi dan menghapus biaya-biaya lingkungan, memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan yang selama ini mungkin mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan keberhasilan bisnis perusahaan, diharapkan menghasilkan biaya atau harga yang lebih akurat terhadap produk dari proses lingkungan yang diinginkan dan memungkinkan pemenuhan kebutuhan pelanggan yang mengharapkan produk/jasa lingkungan yang lebih bersahabat. Tujuan dari akuntansi lingkungan sebagai sebuah alat manajemen lingkungan dan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya (Arfan Ikhsan, 2007).

Dengan adanya informasi yang berkaitan dengan dampak lingkungan yang relevan inilah diharapkan dapat mendorong sebuah bisnis melakukan inovasi, karena dengan melakukan inovasi maka perusahaan akan memperoleh berbagai manfaat tidak hanya berfokus pada pasar (secara eksternal), akan tetapi juga keuntungan di dalam perusahaan itu sendiri (internal). Dalam mendukung harapan ini, sudah selayaknya dapat mendorong sebuah perusahaan untuk melakukan proses bisnis dengan memperhatikan dampak yang akan terjadi dari proses tersebut.

Salah satu tantangan pembangunan yang berkelanjutan adalah tuntutan dan pilihan akan cara berfikir baru serta inovatif. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan bagi generasi yang akan datang (*Commission on Environment and Development* (GRI, 2006). Penting dan besarnya risiko terkait dengan *sustainability* mendorong perlu ditemukannya pilihan metode-metode pengendalian baru, terutama untuk menciptakan transparansi mengenai dampak ekonomi, lingkungan dan sosial bagi para pemangku kepentingan (GRI, 2006).

Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif dari penyelenggaraan usaha dalam suatu perusahaan atau organisasi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan undang-undang Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan.

Menurut Bennett dan James dalam Dian Imanina Nurniyah Burhany (2012) mendefinisikan kinerja lingkungan sebagai *“the company’s sachievement in managing any interactionbetween the company’s activities, products orservices and the environment”*. Kinerja lingkungan adalah pencapaian perusahaan dalam mengelola interaksi antara aktivitas, produk dan jasa perusahaan dengan lingkungan.

Kinerja lingkungan perusahaan menurut Suratno dkk. (2006) adalah kinerjaperusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*). Kinerja lingkunganperusahaan dalam penelitian ini diukur melalui PROPER atau Program Penilaian PeringkatKinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan instrumen yangdigunakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mengukur tingkat ketaatanperusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku. PROPER diumumkan secara rutin kepadamasyarakat, sehingga perusahaan yang dinilai akan memperoleh insentif maupun disinsentifreputasi, tergantung kepada tingkat ketaatannya.

Sistem peringkat kinerja PROPER mencakuppemeringkatan perusahaan dalam 5 (lima) peringkat warna yang mencerminkankinerja pengelolaan lingkungan secara keseluruhan, yaitu emas, hijau, biru,merah dan hitam. Perusahaan berperingkat merah dan hitam merupakanperusahaan yang belum taat, perusahaan berperingkat biru adalah perusahaanyang taat, sedangkan perusahaan hijau dan emas adalah perusahaan yangpengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan. Dengan demikian untukperusahaan berperingkat emas, hijau, dan biru mendapatkan insentif

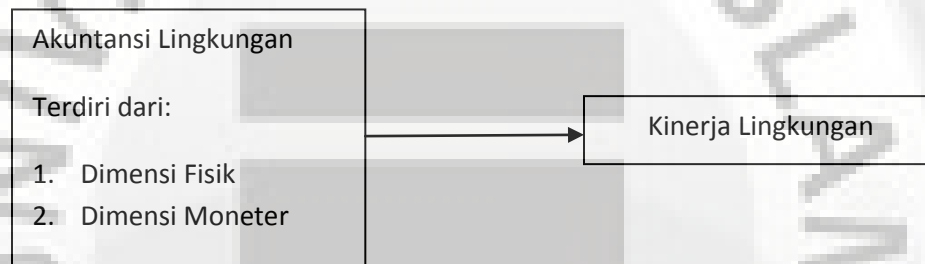


reputasi, sedangkan perusahaan yang berperingkat merah dan hitam mendapatkan disinsentif reputasi.

Pelaksanaan PROPER merupakan salah satu bentuk perwujudan transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, dengan kata lain PROPER juga merupakan perwujudan dari demokratisasi dalam pengendalian dampak lingkungan.

**Gambar 2.1**

### **Kerangka Pemikiran**



### **2.6 Pengembangan Hipotesis**

Kinerja lingkungan merupakan hasil dari pengelolaan lingkungan. Salah satu komponen pengelolaan lingkungan yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan adalah akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan adalah suatu istilah yang berupaya untuk mengelompokkan pembiayaan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan konservasi lingkungan ke dalam pos lingkungan dan praktik bisnis perusahaan. Kegiatan konservasi lingkungan ini pada akhirnya akan muncul biaya lingkungan yang harus ditanggung oleh pihak perusahaan. Penerapan biaya lingkungan dalam perusahaan membantu manajemen untuk mengambil

kebijakan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas dan nilai produk , serta dapat mengidentifikasi berbagai sumber pemborosan dan limbah yang selama ini menyebabkan produksi tidak efisien (Eric Gunawan, 2012).

Penelitian Siros Fakhimi Azar, Robab Shahbazi, Saleheh Abdi Masoom Abad, dan Seyed Nader Mousvi (2014); Burhany (2012) secara konsisten menemukan adanya hubungan dan/atau pengaruh positif implementasi akuntansi lingkungan terhadap kinerja lingkungan. Akuntansi lingkungan khususnya akuntansi manajemen lingkungan berguna bagi manajemen karena dapat menyediakan informasi fisik mengenai input (bahan, air, energi) dan output (produk, limbah, emisi) serta informasi moneter mengenai semua pengeluaran maupun penghematan yang berkaitan dengan lingkungan (Environmental Management Accounting, IFAC 2005).

Informasi tersebut memudahkan manajemen dalam melakukan pengelolaan lingkungan karena manajemen memiliki informasi yang cukup untuk mengendalikan penggunaan bahan, air dan energi, mengendalikan limbah dan emisi, sekaligus mengendalikan biaya lingkungan. Berbagai keputusan yang terkait dengan lingkungan juga bisa diambil dengan adanya informasi tersebut sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan kinerja lingkungan. Selg (1994) dalam Dian Imanian Nurniyah Burhany (2012) menyatakan bahwa salah satu cara untuk melakukan perlindungan lingkungan dalam jangka panjang adalah dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Hipotesis dalam penelitian adalah akuntansi lingkungan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan.

